

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
LAMPUNG**



Skripsi Oleh:

NADILA

01021282025063

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH DANA PERIMBANGAN, HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Disusun Oleh,

Nama : Nadila
NIM : 01021282025063
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING



Tanggal : 21 Februari 2024

Dr. Siti Rohima S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH DANA PERIMBANGAN, HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Disusun oleh

Nama : Nadila
NIM : 01021282025063
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 03 April 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 03 April 2024

Ketua



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

Anggota



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 29-4-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nadila
NIM : 01021282025063
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung

Pembimbing : Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 03 April 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri, dalam skripsi tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 03 April 2024
Pembuat Pernyataan



Nadila
NIM. 01021282025063



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung”. Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Penulis merasa bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, namun kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Indralaya, 5 Februari 2024



Nadila
NIM.01021282025063

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rasa syukur yang amat dalam dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada tim penulis berupa nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan dan juga kepada Nabi Muhammad SAW.
2. Bapak Nazarudin dan Ibu Zaleha selaku kedua orang tua, terima kasih yang tak terhingga serta cinta dan kasih sayang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, tidak pernah lelah memberikan motivasi serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak tercinta Amanah, Nasrullah, Andika Purnama dan Alesha selaku kakak kandung, kakak ipar dan keponakan saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si sekretaris jurusan ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi dan selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu serta saran masukan hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si, selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran-saran terbaik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh dosen di lingkungan jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan materi dan ilmunya pada saat perkuliahan.
11. Teman-teman jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2020 Indralaya dan teman-teman konsentrasi Ekonomi Keuangan Daerah angkatan 2020 yang telah memberikan warna selama perkuliahan.
12. Teman-teman dekatku semasa perkuliahan Nanda Muthiah, Affan Faresa, Riska Anggraini, Bella Sari, Muhamad Nisar, Desnico Pratama, dan anggota grup Barbar yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Indralaya, 25 Februari 2024
Penulis



Nadila
NIM. 01021282025063

ABSTRAK

PENGARUH DANA PERIMBANGAN, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA KAB/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

Nadila; Siti Rohima

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal di Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam rentang waktu 2010-2022. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linear berganda data panel dengan metode pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan secara parsial variabel dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Mukhlis., S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF BALANCED FUNDS, SEPARATE REGIONAL WEALTH MANAGEMENT RESULTS AND EXCESS BUDGET FINANCING ON CAPITAL EXPENDITURES IN REGENTS/CITIES IN LAMPUNG PROVINCE

By:

Nadila; Siti Rohima

This research aims to analyze the influence of the Balancing Fund, Separated Regional Wealth Management Results, and Excess Budget Financing on Capital Expenditures in Lampung Province. The data used in this research is panel data on 15 regencies/cities in Lampung Province in the 2010-2022 period. The analysis technique used is a linear multiple panel data analysis technique using the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results of this research show that simultaneously and partially the balancing fund variables, the results of regional wealth management that are released and the excess budget balance together have an influence on capital expenditure.

Keywords: *Balancing Funds, Results of Separated Regional Wealth Management, Excess Budget Financing, Capital Expenditures*

Known by,
Head of Development Economics Departement

Advisor



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Nadila
	NIM	01021282025063
	Tempat, Tanggal Lahir	Tanjung Raja, 20 Mei 2002
	Alamat	Jl. Merdeka No 288 LK II RT/RW 003 Tanjung Raja, Ogan Ilir - Palembang
	Handphone	0895373401672
AGAMA	Islam	
JENIS KELAMIN	Perempuan	
KEWARGANEGARAAN	Indonesia (WNI)	
TINGGI BADAN	163 cm	
BERAT BADAN	55 kg	
EMAIL	nadilad190@gmail.com	
RIWAYAT PENDIDIKAN		
2008-2014	SD Negeri 20 Tanjung Raja	
2014-2017	SMP Negeri 1 Tanjung Raja	
2017-2020	SMA Negeri 1 Tanjung Raja	
2020-2024	Universitas Sriwijaya	
RIWAYAT ORGANISASI		
2020-2021	Sekretaris Divisi Medinfo EIT FE Unsri	
2021-2022	Anggota Dept. Danus IMEPA FE Unsri	
2022-2023	Sekretaris Komisi I DPM FE Unsri	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	I
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	II
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
UCAPAN TERIMA KASIH	V
ABSTRAK	VII
ABSTRACT	VIII
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	14
2.1.2 Teori Transfer	17
2.1.3 Teori Investasi.....	21

2.2 Definisi dan Konsep.....	23
2.2.1 Dana Perimbangan.....	23
2.2.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	24
2.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	24
2.2.4 Belanja Modal.....	26
2.3 Penelitian Terdahulu	28
2.4 Kerangka Pikir	32
2.5 Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	35
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3 Teknik Analisis Data.....	36
3.1.1 Metode Regresi Data Panel.....	36
3.1.2 Pemilihan Model Terbaik	38
3.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	40
3.1.4 Uji Statistika	41
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum.....	44
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	44
4.1.2 Perkembangan Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	46
4.1.3 Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	48
4.1.4 Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	50
4.2 Hasil Penelitian	52
4.2.1 Model Regresi Data Panel	52
4.2.2 Pemilihan Model Akhir	53

4.2.3 Analisis Individu.....	56
4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik.....	60
4.2.5 Pengujian Koefisien Statistik.....	62
4.3 Pembahasan.....	66
4.3.1 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal	66
4.3.2 Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Belanja Modal	67
4.3.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal.....	68
4.3.4 Pengaruh Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan Terhadap Belanja Modal.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Perimbangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2022 (dalam miliar rupiah)	4
Tabel 1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2022 (dalam miliar rupiah)	6
Tabel 1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (dalam Miliar Rupiah)	9
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	45
Tabel 4.2 Jumlah Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Dalam Miliar Rupiah)	46
Tabel 4.3 Rata-rata perkembangan Dana Perimbangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Dalam Milyar Rupiah)	47
Tabel 4.4 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Dalam Miliar Rupiah)	48
Tabel 4.5 Rata-rata perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Dalam Miliar Rupiah)	49
Tabel 4.6 Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Dalam Miliar Rupiah)	51
Tabel 4.7 Rata-rata perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Dalam Milyar Rupiah)	52
Tabel 4.8 Hasil Estimasi dengan Metode CEM, FEM, dan REM	53
Tabel 4.9 Hasil Regresi Uji Pemilihan Model Terbaik	54
Tabel 4.10 Hasil Regresi Metode <i>Fixed Effect Model</i>	55
Tabel 4.11 Nilai Intersep Individu Tiap-Tiap Kabupaten Dan Kota	57
Tabel 4.12 Persyaratan Uji Asumsi Klasik Regresi Data Panel	61
Tabel 4.13 Hasil Regresi Menggunakan Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4.14 Hasil Regresi Uji Multikolinearitas	62

Tabel 4.15 Hasil Uji F.....	63
Tabel 4.16 Hasil Uji-t.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (dalam Miliar Rupiah).....	10
Gambar 2.1 Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah.....	17
Gambar 2.2 Kurva Pengaruh Transfer Tak Bersyarat.....	19
Gambar 2.3 Kurva Pengaruh Transfer Bersyarat	20
Gambar 2.4 Kurva <i>Marginal Efficiency of Investment</i> (MEI)	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Belanja Modal, Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	80
Lampiran 2	Hasil Regresi Data Panel dengan Common Effect Model	85
Lampiran 3	Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model.....	86
Lampiran 4	Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model	87
Lampiran 5	Hasil Uji Chow	88
Lampiran 6	Hasil Uji Hausman.....	89
Lampiran 7	Hasil Uji BP-LM	90
Lampiran 8	Hasil Uji Multikolinearitas	91
Lampiran 9	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diberlakukannya otonomi wilayah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah atas memberikan otonomi daerah, pemerintah wilayah memiliki kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk melaksanakan wewenang yang diberikan kepada mereka. Dalam upaya mereka untuk membangun negara, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk berekspresi dan berkreasi yang tidak melanggar perundang-undangan. Pemerintah menetapkan sistem pemerintahan desentralisasi yang dikenal sebagai otonomi daerah. Untuk menjalankannya, pemerintah tentu memerlukan banyak uang untuk menjalankan operasi pemerintahan.

Daerah yang terdesentralisasi dan otonom mampu mengendalikan dan mengawasi urusan pemerintahan daerah dan masyarakat. Kewenangan pengalokasian dana diberikan kepada pemerintah, yaitu yang bersumber dari sumber daya daerah. Lebih jauh lagi, tujuan desentralisasi adalah untuk menghasilkan kekayaan dengan memberikan layanan publik, termasuk belanja modal, yang dilakukan untuk kepentingan publik. Kinerja pemerintah dan pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui belanja modal. Pengalokasian belanja modalnya atas kabupaten serta kota di Provinsi Lampung masih belum memadai dan kurang optimal. Hal tersebut di atas memberikan gambaran bahwa aturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 mengenai RPJM memercayakan belanja modalnya

paling sedikit sebesar 29% dari belanja daerah dalam APBD. Meski demikian, pada tahun 2018 hingga 2022, rata-rata belanja modal Provinsi Lampung ke kabupaten dan kota kurang dari 20%. Perihalnya memastikan maka biasanya distribusi belanja modalnya provinsi ke kabupaten dan kota pada tahun 2018 hingga 2022 masih menggunakan sebagian kecil belanja modal dari belanja daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran baik barang maupun jasa yang dilakukan dalam hal pembelian yang memberikan manfaat lebih dari setahun guna melaksanakan program dari pemerintah daerah (Mursyidi, 2013). Selain itu, belanja modal dapat dialokasikan dalam APBD yang didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah akan sarana dan prasarana. Akan tetapi, alokasi belanja modal lebih sedikit dibandingkan dengan alokasi belanja daerah dan belanja rutin. Oleh karena itu, alokasi belanja modal belum terlaksana dengan baik di daerah. Adapun hal yang dapat menyebabkan belanja modal yang cenderung lambat yakni peningkatan belanja modal yang terbatas dan belanja modal dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur – infrastruktur yang besar. Salah satu tindakan yang diharapkan dari pemerintah adalah segera mengalokasikan anggaran belanja modal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, agar tidak terjadi keliru dalam informasi baik dari pemerintah maupun masyarakat (Simanjuntak, 2015).

Salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi terbesar di APBD (Anggaran Pendapatan belanja daerah) yaitu Dana Perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah agar dapat mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Jika pengelolaan daerah dilaksanakan

sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Adapun tujuan dari dana perimbangan ini yaitu digunakan dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah. Pelaksanaan desentralisasi memerlukan biaya yang besar bagi pemerintah daerah. Penerimaan daerah atau pendapatan asli daerah belum cukup dalam mendanai semua kebutuhan daerah. Oleh karena itu, diatur dana pusat yang dapat membantu daerah yang merupakan dana perimbangan.

Dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 19, bahwa dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Upaya yang harus dilakukan sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah otonomi daerah yang mengisyaratkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada daerah otonom juga harus diikuti dengan pembiayaan yang sesuai dengan besar kewenangan tersebut. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan mengimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas alokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun yang ditunjukkan dalam Tabel 1.1 perkembangan dana perimbangan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022 selalu meningkat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Dana Perimbangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2022 (dalam miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Metro	624	601	573	554	571
Kab. Pesawaran	946	898	860	877	905
Kab. Pringsewu	842	863	813	772	875
Kab. Mesuji	964	637	696	577	635
Kab. Tulang Bawang Barat	725	674	624	625	667
Kab. Pesisir Barat	573	589	602	563	561
Kab. Lampung Barat	854	837	709	677	686
Kab. Lampung Selatan	38.82	1.413	1.319	1.299	1.462
Kab. Lampung Tengah	43.76	1.628	1.629	1.691	1.926
Kab. Lampung Utara	120	1.249	1.123	1.110	1.225
Kab. Lampung Timur	42.57	1.370	1.375	1.435	1.511
Kab. Tanggamus	107	1.135	1.081	1.103	1.219
Kab. Tulang bawang	90	826	783	784	933
Kab. Way kanan	102	873	885	902	978
Kota Bandar Lampung	33.025	1.405	1.325	1.342	1.405

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (2023), data diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 pada tahun 2022 menunjukkan Dana perimbangan di Kabupaten Pesisir Barat cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat dalam mendapatkan pembiayaan yang sulit direalisasikan dan sumber pendanaan dalam membiayai suatu kegiatan perlu perubahan yang harus dicari sumber pendanaan alternatif lainnya. Selain itu, disusul dengan Kabupaten Mesuji yang cenderung mengalami penurunan di setiap tahunnya yaitu pada tahun 2020 dengan dana perimbangan 637 miliar rupiah. Selain dana perimbangan, terdapat hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan kekayaan daerah secara mandiri menghasilkan dana yang

diraih daerah temuan penjualan perseroan punya wilayah serta pengurusan asset khas wilayah yang tunduk pada aturan UU daerah. Hal ini yakni diantara sumber penghasilan wilayah yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang berbeda-beda: (1) bagi hasil atas penyertaan pada badan usaha milik negara (BUMN), (2) bagi hasilnya atas milik daerah (BUMD), dan (3) bagi hasilnya pada investasi yang dilakukan pada bisnis swasta atau asosiasi bisnis komunitas. Dalam hal ini modal adalah seluruh atau sebagian kekayaan daerah, dan pendapatan perusahaan daerah adalah sebagian dari pendapatan daerah. Akibatnya, daerah dapat menciptakan usaha-usaha unik dengan tujuan utama meningkatkan output guna meningkatkan pendapatan daerah. Kegiatan usaha perusahaan ini berfokus pada pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan, memberikan ketentraman dan kepuasan kerja kepada karyawan, dan menghasilkan penduduk yang adilnya serta sejahtera karena kekayaan suatu wilayah lebih besar. mereka harus mengelola dan memanfaatkan kekayaan tersebut dan perusahaan daerah diharapkan memberikan kontribusi kepada penghasilan wilayah.

Suatu perusahaan daerah diharapkan memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah karena semakin besar kekayaan suatu daerah, maka dituntut untuk lebih baik dalam mengelola serta memanfaatkan kekayaan yang dimiliki. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2022 (dalam miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Metro	4.34	4.89	5.56	7.34	6.73
Kab. Pesawaran	0.41	0.95	1.60	1.80	1.77
Kab. Pringsewu	1.66	1.79	2.32	3.15	3.23
Kab. Mesuji	1.07	1.61	1.74	2.00	2.77
Kab. Tulang Bawang Barat	1.63	2.36	2.50	2.63	2.55
Kab. Pesisir Barat	2.42	1.73	1.93	2.90	2.41
Kab. Lampung Barat	3.41	4.43	4.81	5.92	5.57
Kab. Lampung Selatan	6.78	8.93	9.65	10.49	7.68
Kab. Lampung Tengah	6.52	6.52	7.23	7.71	7.97
Kab. Lampung Utara	8.98	8.74	9.38	10.37	10.14
Kab. Lampung Timur	2.74	3.18	3.46	3.61	2.76
Kab. Tanggamus	3.88	4.28	4.45	5.84	5.77
Kab. Tulang bawang	3.08	3.09	3.34	4.26	3.43
Kab. Way kanan	3.92	4.63	4.20	4.79	5.01
Kota Bandar Lampung	14.89	17.47	21.28	22.97	19.25

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (2023)

Pada Tabel 1.2 menunjukkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Data ini di dapat dari *website* resmi dirjen perimbangan keuangan yang dikumpulkan dari tahun 2018-2022. Pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kabupaten Pesawaran mengalami penurunan dan kenaikan yang sangat sedikit dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Tabel 1.2 merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam tahun 2018-2022 selama 5 tahun. Berdasarkan Tabel 1.2

diatas menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi rata-rata berada pada Kabupaten Lampung Utara.

Pemerintah daerah diberi otonomi wewenang yang sangat luas untuk merencanakan serta mengalokasikan pendapatan asli daerah yang diperoleh dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah. Daerah yang lebih kaya akan mampu melayani masyarakat dengan lebih efektif dalam hal penyediaan layanan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan kekayaan yang ada di wilayah ini untuk meningkatkan layanan infrastruktur dan fasilitas umum.

Sumber pendanaan lainnya yaitu sisa lebih pembiayaan anggaran. Sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja. Sisa lebih pembiayaan anggaran pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah hasil dari perbedaan antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD, idealnya sisa lebih pembiayaan anggaran harus mencapai nol, yang berarti bahwa penerimaan pembiayaan harus cukup untuk menutup defisit anggaran yang mungkin terjadi. Jika angka sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut positif berarti bahwa ada pembiayaan *netto* setelah dikurangi dengan defisit anggaran, masih tersisa atau dengan penjelasan lain bahwa secara anggaran masih ada dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah atau pengeluaran pembiayaan daerah (Desember *et al.*, 2013).

Pendapatan atas pengeluaran dan transfer menghasilkan kelebihan pembiayaan anggaran. Kelebihan dana dalam jumlah besar dari anggaran akan menjadi tanda buruknya perencanaan dan pengelolaan uang oleh pemerintah daerah (Sukmawati, 2016). Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dapat disumbangkan dari pelampauan target pendapatan, SiLPA dapat terjadi karena kelebihan perhitungan dana (*over estimate*) pada belanja dan sisa lebih pembiayaan anggaran yang bersumber dari anggaran beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, sisa dana tender proyek karena adanya penawaran yang lebih rendah dari pada anggaran yang disediakan proyek tersebut dalam upaya penghematan.

Sisa lebih pembiayaan anggaran yang semakin meningkat setiap tahun akan berdampak terhadap pemenuhan komposisi jumlah belanja daerah pada periode berikutnya. Selain itu pemenuhan cukup tidaknya jumlah belanja daerah pada periode berikutnya ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang dilakukan, oleh karena itu pemerintah harus menciptakan belanja daerah yang berkualitas dan berupaya secara konsisten mengarahkan sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan secara terukur, efektif dan efisien dalam mencapai target yang ditetapkan karena jika tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir maka akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran. Selain belanja daerah, belanja modal berkaitan erat dengan sisa lebih pembiayaan anggaran. Hal tersebut dapat terjadi disetiap daerah apabila belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya tidak terserap dengan baik sesuai program, sehingga akan menghasilkan sisa dana, sisa lebih pembiayaan anggaran setiap tahunnya meningkat. Meskipun kelebihan anggaran yang signifikan mungkin digunakan untuk investasi daerah di masa

depan, hal ini juga secara signifikan menunjukkan kinerja pemerintah yang di bawah standar. Sisa lebih pembiayaan anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (dalam Miliar Rupiah)

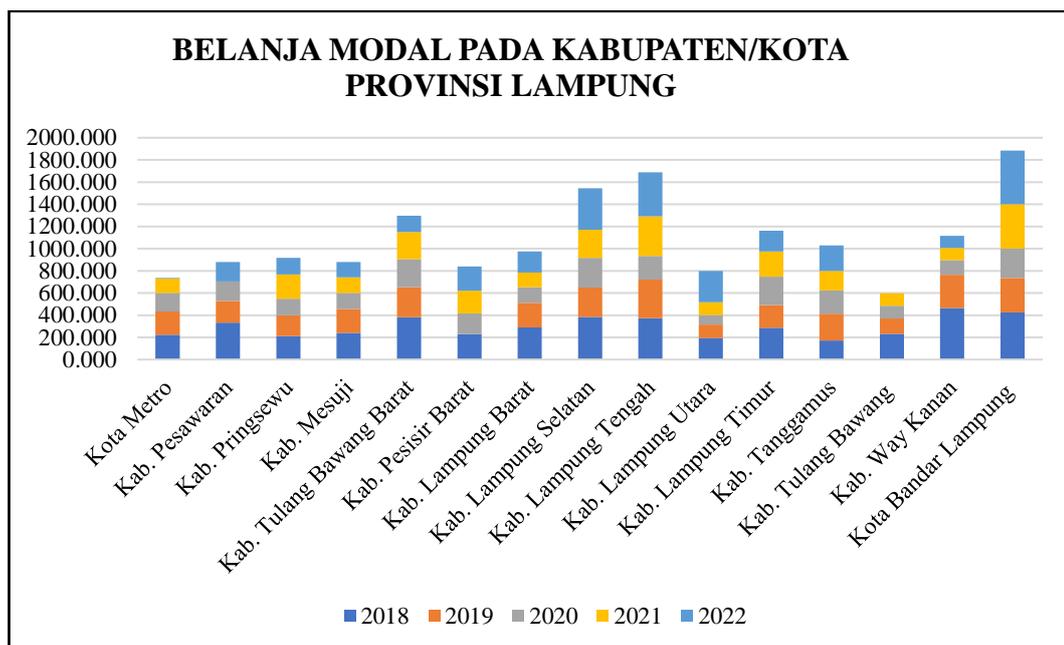
Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Metro	106.3	85.5	106.1	72.3	73.3
Kab. Pesawaran	59.5	3.53	13.31	9.95	14.9
Kab. Pringsewu	44.1	33.9	44.9	60.4	49.2
Kab. Mesuji	81.9	113.7	107.0	99.4	71.5
Kab. Tulang Bawang Barat	22.7	21.4	55.0	50.8	9.60
Kab. Pesisir Barat	81.1	59.4	68.2	34.2	8.87
Kab. Lampung Barat	27.5	40.5	35.2	57.6	142.7
Kab. Lampung Selatan	110.5	189.6	296.8	160.4	7.68
Kab. Lampung Tengah	114.1	139.9	200.0	148.4	191.6
Kab. Lampung Utara	28.8	7.02	65.2	72.0	47.0
Kab. Lampung Timur	101.2	149.8	195.8	137.4	39.8
Kab. Tanggamus	16.1	25.1	55.6	38.49	82.9
Kab. Tulang bawang	35.0	81.5	78.1	67.5	64.8
Kab. Way kanan	25.1	7.96	7.5	11.9	24.9
Kota bandar lampung	10.4	8.8	14.2	11.8	0,00

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (2023)

Pada Tabel 1.3 menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan data didapat dari *website* resmi dirjen perimbangan keuangan yang dikumpulkan dari tahun 2010-2022 yang berarti dalam 13 tahun, tabel di atas merupakan sebagian data yang diambil dari tahun 2018-2022. Berdasarkan Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran

tertinggi rata-rata berada pada kabupaten Lampung Selatan dan rata-rata terendah berada pada Kota Bandar Lampung.

Salah satu permasalahan yang belum terpenuhi pada Provinsi Lampung yaitu belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Jika dilihat realisasi belanja APBD pemerintah provinsi Lampung pada tahun anggaran 2022 sebesar 6,752 triliun atau 95,01% jauh berada diatas rata-rata provinsi. Realisasi belanja APBD Provinsi Lampung 2022 menempati posisi ketiga dibandingkan dengan rata-rata Provinsi di Indonesia. Alokasi belanja modal untuk kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat dari Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (2023)

Pada Gambar 1.1 alokasi belanja modal untuk Provinsi Lampung dari tahun 2018-2022 masih rendah dan belum optimal. Belanja modal pada Kota Metro di tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Perihalnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi Lampung masih kurang memanfaatkan belanja modal dari belanja daerah. Belanja birokratis, seperti mempekerjakan lebih banyak pegawai, lebih sering dilakukan oleh pemerintah daerah atas belanja modalnya, bahkan pelaksanaan belanja modalnya sendiri dapat mendorong investasi di daerah, sementara belanja birokratis dapat mengakibatkan penurunan ekonomi daerah. Karena itu, anggaran belanja modal mungkin perlu dinaikkan karena memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengangkat topik mengenai pengaruh dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?

4. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

1. Berfungsi dalam meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Diharapkan memberikan bantuan atau kontribusi pengembangan konsep belanja modal untuk pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat meningkatkan efisiensi belanja modal.
3. Bagi pemerintah daerah provinsi, penelitian ini dapat menjadi sumber masukan dan acuan yang berguna bagi pemerintah dalam upaya pengambilan kebijakan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat daerah khususnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

b. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan menjadi manfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai belanja modal khususnya pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
2. Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi kajian-kajian mengenai belanja modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan informasi ilmiah dan pertimbangan bagi pihak terkait serta bagi peneliti sebagai bahan perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh sisa anggaran, pendapatan sendiri, dan dana perimbangan terhadap belanja modal. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 7(1), 179–202.
- Ali, K., & Ningsih, N. W. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(1), 85–101.
- Aprianto, I. (2021). The Effect Of Leverage, Legislative Measures, Intergovernmental Revenue And Regional Tax Revenue On Regency/City Government Financial In Indonesia. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 9(3), 91–99. <https://doi.org/10.35335/ijafibs.v9i3.3>
- Armaja, A., Ibrahim, R., & Aliamin, A. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181.
- Arifah, N. A., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–8.
- Astuti, H. F., & NR, E. (2021). Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 624–639.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Statistik indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Damar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Temuan Audit Terhadap Kinerja

- Pemerintah Daerah. *Jurnal Al Iqtishad*, 2(16), 39–57.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Postur APBD*. DJPK Kemenkeu. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Postur TKDD*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>
- Desember, V. N., Pendapatan, P., Daerah, A., Alokasi, D., Dan, U., & Mentayani, I. (2013). *Jurnal Infestasi*. 9(2), 91–102.
- Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, & Samino Hendriyanto. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 76–100.
- Ekonomi, J. umal, & Pembangunan, F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah. *118.97.35.230*, 2(3), 632–641. <http://118.97.35.230/lemlit/jtt/250.pdf>
- Evidence, M., & Canada, F. O. R. (1993). Does Government Public Capital Expenditure Matter?: Evidence for Canada. *Economic Analysis and Policy*, 28(2), 199–211. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(98\)50019-7](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(98)50019-7)
- Fibriana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur). 1–21
- Funangi, U., Mollet, J. A., & Bisay, C. M. (2016). Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah* /, 43–62.
- Fitriana, R., & Warni. (2021). The Role of Balancing Fund and Budget Calculation

- Excess Remaining (SiLPA) on Regional Expenditures in the Bandung Regency Government. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 2(2), 392–405. <https://doi.org/10.34010/icobest.v2i.298>
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar* (T. S. Zain (ed.)). Salemba Empat.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar - Dasar Ekonometrika* (S. Empat (ed.)). Salemba Empat
- Guerrero, O. A., Castañeda, G., Trujillo, G., Hackett, L., & Chávez-Juárez, F. (2022). Subnational sustainable development: The role of vertical intergovernmental transfers in reaching multidimensional goals. *Socio-Economic Planning Sciences*, 83(January 2021).
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (17th ed.). Rajawali Pers
- Kosim, E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Anggaran Belanja Modal Pada pemerintah kota Banjar. *Journal of Management Review*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.25157/jmr.v1i1.509>
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. In Yogyakarta. Erlangga
- Kherbache, N., & Oukaci, K. (2020). Assessment of capital expenditure in achieving sanitation-related MDG targets and the uncertainties of the SDG targets in Algeria. *World Development Perspectives*, 19(July), 100236. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100236>
- Kartika, M. (2015). Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(1), 45. <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11461>
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia
ABSTRAK Otonomi daerah atau Desentralisasi pada Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 yang menjelaskan kewajiban pemda untuk mengendalikan dae.
E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(3), 1255–1281.

Mangkoesebroto. (2016). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). BPFE-Yogyakarta

Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, XV(1), 57–66.

Masaki, T. (2018). The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania. *World Development*, 106, 173–186. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.026>

Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>

Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 43–59.

Rohima, S., Bashir, A., Mardalena, M., & Putri, A. K. (2022). The Effect of Taxes and Capital Expenditures on Economic Growth The Effects of the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(2), 115. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v6i2.464>

Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 8(2), 54–68.

- Sari, N., Djuanda, G., & Sarwani, S. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 91–100. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.92>
- Sanjaya, D., & Helmy, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dengan Petumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Se- Indonesia periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 450–469. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.369>
- Simamora, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap belanja daerah: dalam prespektif teoritis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(2), 258–271.
- Tiyas, E. A., & Wuryani, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(3), 22–33. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n3.p22-33>
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(33), 44–5